

Politik Hukum Pengaturan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pada Pasien Anak yang Berkeadilan Teosentrik

ABSTRAK

Penelitian ini beranjak dari permasalahan pengaturan persetujuan tindakan kedokteran yang melibatkan anak sebagaimana yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, UU Rumah Sakit dan UU Tenaga Kesehatan di Indonesia, yaitu pelimpahan wewenang tanpa batas pada persetujuan Tindakan kedokteran oleh orang tua/ wali pada anak (*surrogate consent*) termasuk vaksinasi anak; hak penolakan tindakan kedokteran tanpa batas pada *maternal-fetal conflict* telah menyebabkan pertentangan antara Asas Menghormati Otonomi Pasien (*principle of respect to the patient's autonomy*) dengan Asas Manfaat (*principle of beneficence*) dan Asas Keadilan (*principle of justice*), serta memiliki akibat hukum yaitu dilanggarnya Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 359 KUHP. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan filosofi, konsep dan perbandingan hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaturan yang ada secara substansi, maksud dan tujuan bertentangan dengan nilai Pancasila (khususnya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab; serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia), Tujuan nasional negara Indonesia (yaitu memajukan kesejahteraan umum), Jaminan Konstitusi terhadap aspek Kesehatan serta melanggar hak asasi manusia (yaitu hak atas pelayanan Kesehatan), sehingga perlu politik hukum melalui reformulasi Undang-Undang yang membatasi wewenang pasien, orang tua/ wali atas dasar kepentingan terbaik anak sehingga tercapai perlindungan hak anak atas pelayanan Kesehatan yang berkeadilan Teosentris.

Kata kunci :

Politik Hukum, Persetujuan Tindakan Kedokteran, Hak Asasi Anak, Praktik Pelayanan medis, Keadilan Teosentrik

LEGAL POLITICS REGULATIONS ON INFORMED CONSENT FOR PEDIATRIC PATIENTS WITH THEOCENTRIC JUSTICE

ABSTRACT

This research departs from the problem of regulating informed consent involving children as regulated in the Medical Practice Law, Health Law, Hospital Law and Health Workers Law in Indonesia, namely the delegation of unlimited authority on informed consent by parents/guardians in children (surrogate consent) including childhood vaccinations; the right to refuse medical treatment without limits in maternal-fetal conflict has caused a conflict between the principle of respect for the patient's autonomy and the principle of beneficence and the principle of justice, and has legal consequences, namely violation of Article 76 C of the Child Protection Act and Article 359 of the Criminal Code. This research uses normative juridical research with a statutory approach that is supported by philosophical, conceptual and comparative legal approaches. The results of the study show that the existing regulations are substantially contradictory to the values of Pancasila (particularly the value of God Almighty, just and civilized humanity; and justice for all Indonesian people), the national goals of the Indonesian state (i.e. promoting social welfare), Constitutional guarantees on health aspects and violate human rights (namely the right to health services), so that legal politics is needed through the reformulation of Acts that limit the authority of patients, parents/guardians on the basis of the best interests of children so that protection of children's rights to health services is achieved, for theocentric justice.

Keywords :

Legal Politics, Informed Consent, Child Rights, Medical Service Practice, Theocentric Justice